

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Birch. S. 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford University Press. Oxford.
- Budiardjo, M. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Denzin N. K. & Lincoln Y. S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Evrensel, A (eds). 2010. *Voter Registration in Africa: A Comparative Analysis*. Johannesburg: Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa (EISA).
- Hartono B. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta. Jakarta
- Reynold, Reilly, Ellis. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia. International IDEA
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Elfabeta. Bandung.
- Surbakti, R, Supriyanto, Asy'ari. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.
- Surbakti, R, Supriyanto, Santoso. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Wall, Ellis, Ayoub, Dundas, Rukambe, Staino. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Stockholm: International IDEA
- Yin, R.K. 2015. *Studi Kasus, Desain & Metode*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Yuda, H. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Asy'ari, H. 2012. Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. 2. No. 1. Februari 2012: 1-33.
- Bisariyadi, Triningsih, A, Rahmawaty, H.M, Harumdani, W.A. 2012. Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 3, September 2012: 531-562
- Faridhi, A. 2018. Penggunaan Surat Keterangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 5. No. 2. Desember 2018: 86-93.
- Golonggom, Z, Liando, D. M, dan Mamentu, M. 2016, Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* Vol. 3. Edisi XX. Januari-Februari 2016: 1-19.
- Hidayatulloh, B. A. 2018. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Pranata*. Vol. 1. No. 1. September 2018: 56-67.
- Junaidi, V. 2009. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, September 2009: 103-143
- Mozaffar and Schedler. 2002. The Comparative Study of Electoral Governance. *Journal International Political Science*. 23 (1): 5-27.
- Nasution, F.A. Thamrin, M.H. & Ritonga, A. D. 2020. Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 12 (2) (2020): 97-113.
- Pasaribu, T, Sumadinata, Muradi. 2018. Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015). *Journal of Governance*. Vol. 3. No. 2. Desember 2018: 168-183.
- Rahmawati, R. 2018. Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* Vol. 3 No. 2. Februari 2018: 1-13.
- Sari F. S, Dolly, Nasir. 2019. Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*. Vol. 3. No. 2. Juni 2019: 33-40.

Simamora, J. 2013. Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial*. Vol. 6 No. 2 Agustus 2013: 123-142.

The ACE Electoral Knowledge Network. 2012. *The ACE Encyclopedia: Voter Registration*. Revision Number 3.

Umasangadji, F, Rumapea, Rompas. 2015. Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2014-2019 (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Administrasi Publik*. No.31. Vol. III. 2015: 1-8.

Zuhri, S. 2018. Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2018: 94 - 107

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

<https://dpr.go.id/jdih/index/id/1699>, diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 21.40 WIB.